

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seperti apa implementasi SNP PT terhadap tenaga perpustakaan yang ada diperguruan tinggi Sumsel. Penulis telah mendapatkan data dari informan, informan pada penelitian ini yaitu kepala perpustakaan dan pustakawan karena kepala perpustakaan lebih banyak mengetahui informasi terkait dengan penelitian juga penambahan informasi terkait penelitian ini melalui wawancara dengan satu pustakawan. Berikut daftar nama-nama informan:

Tabel 4.1
Karakteristik informan

No	Nama	Informan	Jumlah
1	Assoc. Prop. Dipl.-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D	Kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya	2 Orang
2	Novita Olivien, S.Sos	Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya	
3	Ir. A. Rahman, MT	Kepala UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya	2 Orang
4	Nilawati, S.E.	Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya	

5	Dra. Nirmala Kusumawatie S.IP.M.Si Kusumawatie S.IP.M.Si	Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah	2 Orang
6	Nurmalina, S.Ag.,S.S.M.	Pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah	
Total			6 Orang

Wawancara dilakukan secara langsung bertemu dengan kepala perpustakaan dan pustakawan dari 3 tempat penelitian, wawancara dilakukan melalui pendekatan dan perkenalan terlebih dahulu dengan informan, setelah melalui perkenalan kemudian informan dimintai waktunya untuk bersedia diwawancarai, wawancara secara langsung dan online.

Pada penelitian ini wawancara yang dilaksanakan berjalan lancar dan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara secara mendalam, sehingga apabila informan memberi jawaban yang belum memuaskan maka penulis akan mengajukan pertanyaan lagi sampai dirasa jawaban yang diberikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hasil pada penelitian yang ditampilkan adalah hasil reduksi yaitu melalui proses pemilihan, pemusatan dan penyederhanaan data agar relevan dengan judul penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

A. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya

Pada UPT Perpustakaan UNSRI itu asal mulanya dari perpustakaan kecil milik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syayakarti kemudian mendapat status Universitas Negeri Sriwijaya. Pada masa adanya perpustakaan ini pemimpinya silir berganti sesuai dengan masa jabatannya, saat ini perpustakaan UNSRI dikepalai oleh bapak Assoc. Prop. Dipl.-Ing. Ir. Amrifan Saladin Mohruni, Ph.D ia mulai mejabat dari tahun 2018-sekarang. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara terkait dengan SNP Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017 tentang tenga perpustakaan apakah telah terlaksana sesuai Standar yang ditetapkan pada UPT perpustakaan UNSRI.

1. SNP PT No. 13 tahun 2017 Terkait Ketua Perpustakaan

Untuk mengetahui apakah SNP PT No.13 tahun 2017 ini telah diterapkan atau tidak pada UPT perpustakaan UNSRI maka peneliti akan memilih bapak Amrifan selaku kepala perpustakaan dan ibu Novita selaku pustakawan disana yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian pada UPT perpustakaan UNSRI Indralaya berikut pernyataanya:

a. Bertanggung Jawab Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

“iya bertanggung jawab kepada rektor, segala hal yang dilakukan oleh perpustakaan. contohnya perpustakaan berlangganan jurnal online nah itu harus dilaporkan jurnal apa yang dilanggan dan seberapa banyak peningkatan mahasiswa menggunakan jurnal tersebut karena itu adalah sebuah tanggung jawab”¹

¹ Amrifan Saladin Mohruni, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya, August 16, 2021.

Peraturan pada SNP PT terkait kepala perpustakaan yaitu perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi. Jika dikaitkan dengan jawaban dari bapak Amrifan maka kepala perpustakaan UNSRI telah memenuhi point dalam bertanggung jawab kepada kepala pimpinan perguruan tinggi.

b. Pendidikan

*“Saya telah menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di dibidang teknik mesin, karena peraturan dari unsri yang menjadi kepala perpustakaan itu dosen. Untuk perpustakaan ini ada dua acuan kemendikbud dan perpeustakaan nasional, berhubung bukan termasuk bagaian dari perpugas jadi perpug ini menngacu ke kemendikbud”.*²

Pada Standar Nasional Perpustakaan yang telah disebutkan pada Pasal 2, khususnya untuk perpustakaan perguruan tinggi, yaitu berfokus ke standar tenaga kerja perpustakaan diuraikan lebih jelas lagi pada SNP PT No. 13 Tahun 2017 pada aspek tenaga perpustakaan Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.³

Jawaban dari bapak Amrifan diatas dapat kita ketahui bahwa bapak Amirifan sendiri memang bukan lulusan dibidang ilmu perpustakaan tetapi beliau telah menempuh pendidikan S2 dibidang ilmu lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari sisi pendidikan bapak

² Saladin Mohruni, Pukul 13:50 WIB.

³ “Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017,” n.d.

Amrifan telah memenuhi SNP PT karena pada SNP PT tersebut tertulis paling rendah setidaknya S2 ilmu perpustakaan atau dibidang lain.

c. Sertifikasi

Pada kesempatan ini peneliti juga menanyakan sertifikat kompetensi apakah dimiliki oleh bapak Amrifan sebagai bukti bahwa telah mengikuti pelatihan kompetensi karena itu penting untuk menunjang skill dibidang ilmu perpustakaan untuk memahami kegiatan kerja yang dijalani, berikut jawaban dari bapak Amrifan:

“Saya memiliki sertifikasi dosen tidak memiliki sertifikasi dibidang perpustakaan karena stand duta unsri merubah bahwa yang dapat menjabat kepala UPT perpustakaan itu harus dosen, jadi berubah dan mengikuti peraturan dari unsri.”⁴

SNP PT No.13 tahun 2017 menyantumkan standar bagi Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi yang harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.⁵

Hasil wawancara mengenai sertifikat kompetensi, bapak Amrifan selaku ketua perpustakaan UNSRI Indralaya beliau tidak memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan, karena beliau adalah seorang dosen jadi memiliki sertifikasi dosen. Sehingga dapat

⁴ Saladin Mohruni, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya, Pukul 13:50 WIB.

⁵ “Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017,” n.d.

disimpulkan untuk memenuhi poin sertifikat kompetensi perpustakaan bapak Amrifan belum memenuhinya.

Pada dasarnya sertifikasi kompetensi itu adalah Proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen dengan mengacu kepada pada SKKNI Bidang Perpustakaan terhadap Pustakawan. Proses yang sistematis, Sistem Sertifikasi (yang mengandung kumpulan prosedur dan sumberdaya) serta Output dari sertifikasi adalah Sertifikat Kompetensi & Pustakawan, pengakuan atas penguasaan kompetensi pada bidang perpustakaan, yang dikeluarkan oleh LSP Pustakawan (ada masa waktu berlaku/tidak permanen, harus dimonitor).⁶

2. SNP PT No. 13 tahun 2017 Terkait Pustakawan

Adanya SNP PT terkait tenaga perpustakaan agar terjalannya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dengan baik. Pustakawan sendiri kita ketahui merekalah yang mengelola buku perpustakaan dari mulai pembelian sampai buku tersebut bisa sampai ketangan pemustaka untuk dibaca dan dipinjam. Adanya pustakawan tersebut harus seimbang dengan pemustaka atau mahasiswa yang ada diperguruan tinggi, agar terjadinya keseimbangan dalam melakukan pelayanan. Dari aturan ini lah penulis menanyakan informen terkait pustakawan yang ada di perpustakaan UNSRI Indralaya,

⁶ Endang Ernawati, "Sertifikasi Kompetensi Pustakawan: Manfaat Dan Pengaruhnya Terhadap Jenjang Karir Pustakawan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi," <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25299/2/materi2.pdf>.

penulis mewawancarai ibu Vivin selaku pustakawan di UNSRI selaku mewakili kepala perpustakaan:

Berapa jumlah pustakawan di UPT perpustakaan UNSRI?

“Diperpustakaan UNSRI ini punya 13 orang pustakawa, tetapi jika mau dibandingkan dengan SNP tentu belum tercapai tetapi saat inikan telah jamannya digital jadi pelayanan online itu bisa memenuhi kebutuhan pengguna bisa sampai 2-3 orang”⁷

Apakah rata-rata dari tenaga perpustakaan disini memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan?

“Latar belakang pendidikan ke 13 pustakawan itu berbeda-beda karena beberapa dari mereka ada jaga yang jalur inpassing, ada yang lulusan ilmu perpustakaan itu 2 orang dan sisanya bukan dari lulusan ilmu perpustakaan seperti sarjana ilmu sosial, sarjana ekonomi dan masih banyak lagi”⁸

SNP PT No.13 tahun 2017 memberikan standar jumlah pustakawan yang sesuai untuk perpustakaan perguruan tinggi yaitu rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan.⁹ Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah pustakawan pada UPT perpustakaan UNSRI Indralaya itu ada 13 orang dan jumlah mahasiswa yang terdaftar laki-laki berjumlah 15.465 perempuan berjumlah 22.678 jadi jumlah keseluruhan mahasiswa universitas negeri sriwijaya berjumlah 38.143 mahasiswa.¹⁰ Jika dibandingkan dengan SNP PT terkait pustakawan itu paling sedikit 1 pustakawan untuk 500 mahasiswa, itu berarti bahwa jumlah

⁷ Olivien Novita, Wawancara langsung kepada pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya, August 16, 2021, Pukul 14:20 WIB.

⁸ Novita, Pukul 14:20 WIB.

⁹ “Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017,” n.d.

¹⁰ “Pangkalan Data Pendidikan Tinggi,” n.d., <https://pddikti.kemdikbud.go.id>.

mahasiswa unsri bila dibagi dengan jumlah pustakawannya itu belum memenuhi standar, yang seharusnya ada sekitar 76 pustakawan untuk memenuhi standar itu.

Pustakawan pada UPT perpustakaan UNSRI ada 13 dan beberapa diantaranya adalah menjadi pustakawan melalui jalur inpassing. inpassing itu memang telah diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional RI No.3 Tahun 2019, pasal 1 ayat 13 yang berbunyi “Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu”.¹¹

Beberapa point penting yang harus diperhatikan bagi PNS apabila ingin beralih menjadi JFT Pustakawan antara lain:¹²

1. Berijazah paling rendah Diploma dua (D2) semua bidang ilmu;
2. Pangkat, golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b;
3. Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara akumulatif paling singkat

¹¹ “Peraturan Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/ Inpassing,” August 31, 2021, Pukul 20:55 WIB, https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/PERKA_Nomor_3_Tahun_2019_Tentang_Tata_Cara_Pengangkatan_Pegawai_Negeri_Sipil_Dalam_Jabatan_Fungsional_Pustakawan_Melalui_Penyesuaian_Inpassing.pdf.

¹² “Peraturan Perpustakaan Nasional RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/ Inpassing;,” September 7, 2021, Pukul 11:36 WIB.

- 2 (dua) tahun, (tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2019);
4. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/ sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, (tercantum dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No. 3 Tahun 2019);
 6. Lulus uji kompetensi melalui: - Uji tertulis - Portofolio dan wawancara (bagi fungsional yang dibebaskan sementara);
 7. Usia paling tinggi 56 tahun (pada saat pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda);
 8. Usia paling tinggi 58 tahun (pada saat pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Madya);

Berdasarkan ke-8 point diatas terdapat 2 (dua) point yang sering tidak ditaati oleh PNS yang akan melakukan inpassing jabatan fungsional pustakawan, yaitu memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dan usia paling tinggi 56 tahun (pada saat pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda). Tetapi pada kenyataannya PNS yang belum memiliki pengalaman 2

(dua) tahun dan usia yang sudah lebih dari 56 tahun masih bisa mengikuti inpassing jabatan fungsional pustakawan.¹³

3. SNP PT No. 13 tahun 2017 Terkait Tenaga Teknis Perpustakaan

SNP PT juga memberikan paparan tentang tenaga teknis yang ada di perpustakaan, penulis juga menanyakan hal terkait dengan ini kepada Ibu Novita berikut jawabannya:

“untuk tenaga teknis di perpustakaan ini jumlahnya ada 6 orang untuk dibagian teknis.”¹⁴

Standar untuk tenaga teknis yaitu itu 1 tenaga teknis berbanding 5.000 mahasiswa. Jika dilihat jumlah mahasiswa UNSRI Indralaya itu berjumlah 38.143 sedangkan tenaga teknis yang tersedia ada 6 orang, berarti peraturan untuk pemenuhan tenaga teknis ini belum memenuhi standar karena kurangnya 1 tenaga lagi yang seharusnya 7 orang tenaga teknis.

Pada perpustakaan UNSRI Indralaya ada beberapa peraturan yang telah dijalankan sesuai SNP PT terkait tenaga perpustakaan dan ada juga yang belum menerapkan standar itu. Penulis mencoba menanyakan kepada informan apakah ada kendala dalam menerapkan peraturan SNP PT terkait tentang tenaga perpustakaan:

“Setiap aturan atau standar itu jika diterapkan pasti ada kendalanya, tetapi bukan tidak mungkin kita kalau kita tidak bisa memenuhi standar A kita bisa

¹³ Ema Riskika, “Inpassing Pustakawan Jangan Hanya Dijadikan Kesempatan Memperpanjang Usia Pensiun,” September 24, 2021, Pukul 11:35 WIB, <https://dkpus.babelprov.go.id/content/inpassing-pustakawan-jangan-hanya-dijadikan-kesempatan-memperpanjang-usia-pensiun>.

¹⁴ Novita, Wawancara langsung kepada pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya, Pukul 14:20 WIB.

memenuhi standar B hanya saja ada beberapa yang belum bisa terpenuhi karena perpustakaan universitas ini dibawah naungan pemerintah, kita melakukannya sesuai dengan aturan pemerintah jadi kita tidak bisa sembarangan untuk memenuhi tenaga yang kurang karena itu dari pemerintah yang mengadakan dan biayanya juga dari pemerintah jadi kita ikut alur pemerintah untuk pemenuhan itu.”¹⁵

Seperti apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

“kalau untuk upaya seperti yang saya katakan tadi, jika kami kekurangan di bidang A kami usakan untuk memenuhi dibidang B seperti koleksi/bahan pustaka, kami bisa memenuhi koleksi dan fasilitas yang kurang karena itu tidak harus melalui pemerintah yang mengontrol seperti halnya untuk pemenuhan tenaga perpustakaan. Kalau untuk pemenuhan tenaga kerja pustakawankan itu PNS, jadi untuk penambahannya diperpustakaan UNSRI itu kurangnya berapa dan perluna berapa itu bukan wenangny kami, kerena itu dari pemerintah yang menerimanya dan memberi pemenuhannya bukan dari intitusi, kami hanya bisa mengajukan ke institusi butuhnya berapa orang untuk tenaga perpustakaan tapi apakah soal itu di setujui dan penuhi oleh BKN serta pemerintah itu belum dapat dipastikan”¹⁶

Pada SNP PT No.13 tahun 2017 juga mencantumkan tentang standar untuk tenaga teknis perpustakaan yaitu rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.¹⁷

Pada perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya beberapa standar ada yang telah diimplementasikan ada juga yang belum, kendala yang dihadapi oleh perpustakaan unsri masih pada kurangnya tenaga kerja karena mereka tidak bisa menambah tenaga kerja, dan mengikuti peraturan yang ada di Unsri jadi mereka hanya mengupayakan untuk memenuhi keutuhan mahasiwa

¹⁵ Novita, Pukul 14:20 WIB.

¹⁶ Novita, Pukul 14:20 WIB.

¹⁷ “Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017,” n.d.

seperti penambahan bahan pustaka dan melanggan jurnal yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa disana.

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan Universitas Negeri Sriwijaya telah memenuhi beberapa poin dari Standar Nasional Perpustakaan No.13 tahun 2017 pada aspek tenaga perpustakaan. Hal yang terpenuhi yaitu pada poin pendidikan kepala perpustakaan karena kepala perpustakaan telah menempuh pendidikan magister ilmu lain, karena bapak Amrifan selaku kepala perpustakaan telah menempuh pendidikan magister dibidang teknik mesin. Tetapi untuk kepemilikan sertifikasi kompetensi belum terpenuhi karena bapak Amrifan adalah seorang dosen dan memiliki sertifikasi dosen, dan juga pustakawannya belum memenuhi standar karena hanya 13 orang pustakawan serta tenaga administrasinya 6 orang sehingga jika dibagi dengan jumlah mahasiswa UNSRI masih kurang sehingga belum sesuai dengan standar.

B. UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya

1. SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait ketua perpustakaan

Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI) adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bersama unit lainya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perpustakaan ini mengalami perkembangan yang awalnya belum ada pemimpin dari 1982-1989 karena ada 1 petugas yang melayani, namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan semakin pesat kini perpustakaan telah memiliki ruang yang

cukup besar dan memiliki struktur organisasi untuk pengolahan dan pelayanan perpustakaan dan saat ini perpustakaan itu dikepalai oleh bapak Ir. A. Rahman, MT. melihat perkembangan perpustakaan polsri saat ini maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Rahman dan Ibu Nilawati selaku sekretaris disana untuk mengetahui apakah UPT perpustakaan polsri telah mengimplementasikan SNP PT No.13 tahun 2017 tentang tenaga perpustakaan, berikut jawaban bapak Rahman selaku ketua perpustakaan.

a. Bertanggung Jawab Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

“Iya benar, semua hal terkait perpustakaan akan dilaporkan kepada direktur polsri, contohnya seperti buku ini, buku yang baru dibeli nanti akan dibuat berita acara tentang jumlah buku serta buku apa saja yang dibeli, nanti terkait pembelian buku tersebut saya melapor kepada direktur bahwa bukti pembelian buku baru ini.”¹⁸

Peraturan pada SNP PT terkait kepala perpustakaan yaitu perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi. Jika dikaitkan dengan jawaban dari bapak Rahman maka kepala perpustakaan POLSRI telah memenuhi point dalam bertanggung jawab kepada kepala pimpinan perguruan tinggi.

b. Pendidikan

Ketua perpustakaan pada standar nasional perpustakaan untuk perguruan tinggi itu paling rendah S2 ilmu perpustakaan dan informasi

¹⁸ Rahman, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, August 25, 2021.

atau S2 dibidang lain. Bapak Rahman sendiri S2 dibidang teknik berikut pernyataan dari pak Rahman.

“Saya bukan lulusan dari jurusan ilmu perpustakaan, saya S2 dibidang teknik”¹⁹

Dapat diketahui bahwa bapak Rahman telah menempuh pendidikan magister atau S2 itu berarti poin untuk pendidikan pada ketua perpustakaan polsri sudah terpenuhi oleh bapak Rahman.

c. Sertifikasi

Sertifikasi disini haruslah dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, setelah pustakawan mengikuti pelatihan barulah keluar untuk sertifikasinya sebagai bukti telah mengikuti pelatihan. Penulis menanyakan ini kepada bapak Rahman terkait sertifikasi yang dimilikinya, berikut jawabannya:

“Untuk sertifikasi itu saya tidak memilikinya karena saya dosen jadi saya memiliki sertifikasi dosen, kalau sertifikasi dibidang perpustakaan saya tidak ada”²⁰

Dari jawaban bapak Rahman diatas maka dapat kita ketahui bahwa bapak Rahman adalah seorang dosen dan beliau tidak memiliki sertifikasi kompetensi perpustakaan, jadi dapat disimpulkan bahwa poin sertifikasi kompetensi perpustakaan untuk ketua perpustakaan polsri belum memenuhi standar.

Terkait dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi sebenarnya hal ini memiliki dasar hokum untuk sertifikasi antara lain pada Undang-Undang

¹⁹ Pukul 08:33 WIB.

²⁰ Pukul 08:33 WIB.

Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 (8), Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1), (huruf d) yang dimaksud standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 18 ayat (2), menyatakan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.²¹

Pustakawan yang mempunyai sertifikasi kompetensi itu mempunyai tujuan untuk perpustakaan antara lain:²²

- 1) Membantu perpustakaan meyakinkan kepada pemustaka bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
- 2) Membantu perpustakaan dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi meningkatkan efisiensi pengembangan SDM.
- 3) Memastikan perpustakaan mendapatkan tenaga yang kompeten.
- 4) Membantu perpustakaan dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi.
- 5) Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

²¹ Ernawati, "Sertifikasi Kompetensi Pustakawan: Manfaat Dan Pengaruhnya Terhadap Jenjang Karir Pustakawan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi."

²² Ernawati.

2. SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait pustakawan

Pada standar yang tertera jumlah pustakawan akan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, perbandingannya 1 pustakawan : 500 mahasiswa. Perbandingan ini menjadi tolak ukur dalam pelayanan agar dapat berjalan dengan maksimal kepada pemustaka. Pada dasarnya pustakawan bukan hanya memberikan pelayanan kepada pemustaka tetapi juga mengelola dari pembelian buku dan buku tersebut akan diproses oleh pustakawan dibagian pengolahan sehingga buku tersebut dapat digunakan oleh pemustaka. Maka dari dasar standar inilah penulis menanyakan kepada ibu Nilawati selaku skeretaris serta yang mengetetahui tentang pustakawan pada UPT perpustakaan polsri, berikut wawancaranya:

Berapa jumlah pustakawan di UPT perpustakaan POLSRI?

“Jumlah pustakawan di UPT Perpustakaan ini ada 3, yang difakultas ada 1 jadi jumlahnya 4, sisanya itu masih staf yang menjadi tenaga administrasi, karena yang lain belum ada SK pustakawanya kalau pustakawan dia harus mengurus dulu ke UNSRI baru nanti unsri yang ngeluarin”²³

Apakah rata-rata dari tenaga perpustakaan disini memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan?

“Disini cuman ada satu lulusan dari ilmu perpustakaan itu ibu Diah dan yang lainnya umum bukan dari ilmu perpustakaan, seperti sarjana ekonomi, pendidikan, teknik dll”²⁴

²³ Nilawati, Wawancara langsung kepada pustakawan UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, August 25, 2021, Pukul 09:55 WIB.

²⁴ Pukul 09:55 WIB.

Wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pustakawan di UPT perpustakaan polsri ada 2 orang dan jumlah mahasiswa laki-laki 3.916 dan perempuan 4.389 sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa politeknik negeri sriwijaya berjumlah 8.305.²⁵ Jika disesuaikan dengan SNP PT No.13 tahun 2017 tentang pustakwan yang dibandingkan 1:500 mahasiswa maka perpustakaan polsri belum memenuhi poin untuk standar pustakawan yang seharusnya ada 16 pustakawan tetapi polsri memiliki 2 pustakawan.

Tenaga kerja di UPT perpustakaan polsri ini ada 6 orang dan 2 diantaranya adalah seorang pustakawan, sisanya belum menjadi pustakawan tapi semuanya telah menjadi tenaga PNS, seharusnya 4 orang yang belum menjadi pustakawan mereka bisa mengikuti diklat untuk menabih keterampilan mereka di bidang perpustakaan karena telah disampaikan dalam Undang Undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan fasilitas layanan perpustakaan.²⁶

Kompetensi menjadi kata kunci dalam definisi tersebut karena siapapun dia, asal memiliki kompetensi dan bekerja di perpustakaan tanpa

²⁵ “Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.”

²⁶ Harmawan, “Kompetensi Pustakawan: Antara Harapan Dan Kerisauan,” *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, August 31, 2021, Pukul 11:08 WIB, <https://library.uns.ac.id/kompetensi-pustakawan-antara-harapan-dan-kerisauan/>.

memandang perpustakaan negeri atau swasta dapat masuk menjadi pustakawan. Dengan adanya perubahan definisi tersebut kemungkinan penambahan pustakawan baru semakin terbuka yang berarti akan menambah kekuatan.²⁷

3. SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait tenaga teknis perpustakaan

Pada SNP PT juga mengatur tentang tenaga teknis dan disesuaikan jumlah mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Penulis juga menanyakan tentang hal ini kepada ibu Nilawati, berikut jawabannya:

“kalau diperpustakaan ini gak ada yang khusus dibagian karena semuanya disini merangkap kita semua bisa ngelakuinnya, jadi kami ngelakuin pekerjaan juga udah terjadwal misal bulan ini lakuin apa, bulan depan lakuin apa”

Dapat disimpulkan bahwa 6 orang tenaga perpustakaan disana bisa melakukan tugas sebagai tenaga teknis semua berarti poin untuk standar tenaga teknis perpustakaan polsri sudah terpenuhi jika dibandingkan dengan mahasiswanya yang berjumlah 8.305. Tetapi minusnya seharusnya ada ketetapan untuk tenaga teknisnya tersendiri agar mereka lebih fokus dalam pengelolaan bahan pustaka.

Pada UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya telah ada yang memenuhi standar dan ada juga yang belum memenuhi standar yang tertulis di SNP PT No.13 tahun 2017 tentang tenaga perpustakaan. Penulis mencoba bertanya kepada informan apakah ada kendala dalam mengimplementasikan

²⁷ Pukul 11:08 WIB.

SNP PT No.13 tahun 2017 tentang tenaga perpustakaan ini, berikut jawabannya:

“kendala yang dihadapi itu ada karena kami kekurangan dengan tenaga kerja sekarang”²⁸

Seperti apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

“kami tidak bisa untuk menambah tenaga perpustakaan, atau menambah pegawai honor untuk membantu di perpustakaan, kami disini ada 7 orang dan ada beberapa di fakultas, maksud saya yang di fakultas itu pindah ke UPT saja karena di fakultas itu hanya melayani sedangkan disini banyak tugas yang harus dilakukan. Maunya saya seperti itu tetapi belum bisa terpenuhi”²⁹

Pada UPT perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, beberapa standar ada yang belum terpenuhi yaitu terkait dengan tenaga perpustakaan karena mereka tidak bisa menambah pegawai honor ataupun pustakawan karena itu butuh proses dari Unsri, karena itu tenaga perpustakaan di polsri mereka pekerjaannya merangkap dan bisa semua untuk melakukan pekerjaan pustakawan.

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPT perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya telah memenuhi beberapa poin dari Standar Nasional Perpustakaan No.13 tahun 2017 pada aspek tenaga perpustakaan. Hal yang terpenuhi yaitu pada poin pendidikan kepala perpustakaan karena kepala perpustakaan telah menempuh pendidikan magister ilmu lain yaitu magister teknik, tetapi untuk kepemilikan sertifikasi

²⁸ Wawancara langsung kepada pustakawan UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, Pukul 19:55 WIB.

²⁹ Pukul 19:55 WIB.

kompetensi belum terpenuhi karena kepala perpustakaan sertifikasi dosen, ada juga untuk pustakawannya ada 2 orang serta tenaga administrasinya masih kurang sehingga belum sesuai dengan standar.

C. UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Berdasarkan SNP No. 13 tahun 2017 tenaga perpustakaan terdiri atas kepala perpustakaan dengan kualifikasi tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister ilmu lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Serta kepala perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

Pustakawan yang rasionya setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan dan rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.

Pada UPT Perpustakaan UIN raden fatah telah berdiri sejak IAIN raden fatah maka ketua perpustakaanpun seiring waktu berganti-ganti sesuai dengan masa kepemimpinannya. Pada saat ini perpustakaan UIN raden fatah dikepalai oleh ibu Dra. Nirmala Kusumawatie S.IP. M.Si. yang biasa dipanggil dengan sebutan bu mala, beliau menjabat di tahun 2020 dan saat ini UPT perpustakaan telah pindah tempat yaitu pada kampus B UIN raden fatah dan memiliki gedung tersendiri untuk perpustakaan yang berjumlah 3 lantai.

1. SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait ketua perpustakaan

a. Bertanggung Jawab Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

“Iya benar, pokoknya semua hal terkait kegiatan yang ada dipergustakaan itu dilaporkan kepada wakil rektor 1, kecuali terkait dengan anggaran dana itu berhubungan dengan wakil rektor 2 .”³⁰

Peraturan pada SNP PT terkait kepala perpustakaan yaitu perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi. Jika dikaitkan dengan jawaban dari ibu Nirmala maka kepala perpustakaan UIN Raden Fatah telah memenuhi point dalam bertanggung jawab kepada kepala pimpinan perguruan tinggi.

b. Pendidikan

Kepala perpustakaan haruslah memiliki pengetahuan yang lebih dengan pendidikan minimal S2 yang telah dicantumkan pada SNP tenaga kerja perpustakaan karena kepala yang mengelola dan kepala yang mengatur arah perpustakaan itu manu dibawa seperti apa. Mengetahui adanya standar pendidikan untuk kepala perpustakaan, penulis mencoba melakukan wawancara di UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah yang kepala perpusnya adalah ibu Nirmala Kusumawatie dan Ibu Nurmalina selaku pustakawan UIN Raden Fatah yang mengetahui tentang pustakawan. Selaku ketua perpustakaan UIN

³⁰ Nirmala Kusumawatie, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, June 24, 2021.

raden fatah penulis mewawancarai latar belakang pendidikan ibu

Nirmala dan hasil dari wawancara sebagai berikut:

“latar belakang pendidikan ibu selaku ketua perpustakaan, ibu menempuh pendidikan S1, pertama ibu lulusan dari UIN fakultas ushuludin jurusan perbandingan agama dan dengan izin Allah pada tahun 1995 ibu kuliah lagi S1 khusus/ganda jurusan ilmu perpustakaan di UI lanjut S2 di Stisipol itu swasta. Jadi dari kuliah S1 itulah ibu telah bejar bagaimana dunia perpustakaan itu sehingga memahami kerja yang ibu bidangi, ibu juga telah bekerja sebagai pustakawan selama beberapa tahun sebelum ibu menjadi ketua perpustakaan saat ini”³¹

Dapat kita ketahui berdasarkan wawancara kepada ibu Nirmala diatas dari sisi pendidikan ketua perpustakaan telah terpenuhi syarat SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait pendidikan ketua perpustakaan, karena ibu Nirmala menempuh pendidikan S1 ilmu perpustakaan dan telah melalui pendidikan magister pada bidang ilmu lain. Maka standar untuk pendidikan kepala perpustakaan telah terpenuhi oleh ibu Nirmala selaku ketua perpustakaan UIN Raden Fatah.

Standar pendidikan ini telah ditetapkan dalam SNP PT No. 13 Tahun 2017, pada aspek tenaga perpustakaan terkait dengan kepala perpustakaan yaitu kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan

³¹ Kusumawatie, Pukul 13:14 WIB.

informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.³²

c. Sertifikasi

Sertifikasi itu ada berbagai macam dan pustakawan bisa memilih sertifikasi apa yang ingin mereka kuasai karena untuk mendapat sertifikasi itu butuh pelatihan setelah mengikuti pelatihan pustakawan baru bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Terkait hal ini peneliti juga menanyakan kepada ibu Nirmala tentang sertifikasi kompetensi sesuai peraturan SNP PT No.13 tahun 2017 bahwa kepala perpustakaan harus memiliki sertifikasi kompetensi perpustakaan dan berikut jawaban dari ibu Nirmala:

“kalau serifikasi ibu punya, setelah kita mengikuti ujian kita akan dapat sertifikasi kompetensi kalau ibu sendiri dibidang pengolahan bahan pustaka, sertifikat kompetensi itu ada masa berlakunya dan bisa diperpanjang”³³

Dari hasil wawancara mengenai hal sertifikasi, ibu mala selaku ketua perpustakaan UIN raden fatah telah memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang menandakan bahwa ibu mala telah mengikuti ujian terkait dengan pekerjaannya sebagai pustakawan.

³² Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017, n.d.

³³ Kusumawatie, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:14 WIB.

Dalam hal ini ibu mala termasuk sertifikasi ibu Nurmal adalah sertifikasi pada pengolahan bahan perpustakaan karena terdapat beberapa macam skema sertifikasi diantaranya:³⁴

a. Klaster Bidang Pekerjaan

- Pustakawan Profesional pada Klaster Pengembangan Koleksi Dasar
- Pustakawan Profesional pada Klaster Pengolahan Bahan Perpustakaan Dasar
- Pustakawan Profesional pada Klaster Layanan Perpustakaan Dasar
- Pustakawan Profesional pada Klaster Pelestarian Bahan Perpustakaan Dasar

b. Klaster Bidang Keahlian

- Merancang Tata Ruang dan Perabot Perpustakaan
- Melakukan Literatur Sekunder
- Melakukan Penelusuran Informasi Kompleksi
- Melakukan Kajian Bidang Perpustakaan
- Membuat Karya Tulis Ilmiah

³⁴ Ernawati, "Sertifikasi Kompetensi Pustakawan: Manfaat Dan Pengaruhnya Terhadap Jenjang Karir Pustakawan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi," Diakses 30-08-2012 Pukul 20:35 WIB.

2. SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait pustakawan

Pustakawan ialah tenaga kerja pada perpustakaan yang melayani semua pemustaka untuk kebutuhannya, pustakawan bukan hanya sekedar melayani tetapi juga mengolah buku sebelum buku tersebut sampai kepada pemustakanya karena dari itu pustakawan harus memiliki kemampuan untuk mengolah buku serta melakukan pelayanan kepada pemustaka dan juga harus seimbang dengan jumlah pustakawan yang ada dengan mahasiswa yang akan dilayani sehingga pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik, perbandingannya 1 pustakawan berbanding 500 mahasiswa. Untuk mengetahui kesesuaian tersebut penulis menanyakan kembali kepada ibu Nirmala dan ibu Nurmalina terkait hal ini :

Berapa jumlah pustakawan di UPT perpustakaan UIN Raden Fatah?

“Kalau di UPT ini pustakawannya ada 4 orang, jika digabung dengan fakultas maka tiap fakultas memiliki 1 pustakawan jumlah seluruhnya 9 fakultas ditambah 1 pasca sarjana jadi jumlah keseluruhan ada 14 pustakawan”³⁵

Lanjut kata ibu Nurmalina terkait pustakawan

“Dulu tahun 2017 sewaktu ibu menjadi kepala perpustakaan, 3 orang yang menjadi pustakawan yaitu ibu sendiri, ibu Nirmala dan ibu diah, sisanya 10 orang pegawai non PNS, jadi jumlahnya ada 13 orang. Tetapi saat ini ibu diah telah pindah ke pasca sarjana. Alhamdulillah sekarang penambahan pegawai dan pembukaan tenaga pustakawan jadi telah bertambah 2 orang pustakawannya di UPT UIN”³⁶

³⁵ Kusumawatie, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:14 WIB.

³⁶ Nurmalina, Wawancara online via whatsapp kepada pustakawan UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, August 31, 2021, Pukul 13:32 WIB.

Apakah rata-rata dari tenaga perpustakaan disini memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan?

“Latar belakang mereka berbeda-beda, di UPT ini ada 6 orang yang lulusan dari sarjana ilmu perpustakaan, sisanya dari jurusan ekonomi, hukum, dan lain-lain tetapi ada juga yang dari SMA”³⁷

Dapat kita ketahui dari wawancara mengenai pustakwan UIN Raden Fatah, bahwa jumlah pustakawan yang ada itu sebanyak 4 orang dan tenaga honor BLU itu ada 10 orang yang bertugas di perpustakaan, dengan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, hanya 6 orang yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan dengan jumlah mahasiswa laki-laki 8.963 dan perempuan 16.639 sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa UIN Raden Fatah berjumlah 25.602 mahasiswa.³⁸

Jika kita sesuaikan dengan SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait dengan pustakawan yang 500 mahasiswa untuk 1 pustakawan, maka perpustakaan UIN Raden Fatah belum memenuhi SNP tersebut karena dengan jumlah mahasiswa sebanyak 25.602 orang yang seharusnya memiliki 51 pustakawan diperpustakaannya tetapi tidak seimbang dengan pustakawan yang ada sekarang hanya 4 orang.

Pada perpustakaan UIN Raden Fatah 4 orang pustakawannya melalui pendidikan bukan inpassing ataupun diklat. Sebenarnya hal ini

³⁷ Kusumawatie, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:14 WIB.

³⁸ “Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.”

telah diatur karena pengangkatan PNS ke jabatan Fungsional pustakawan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang salah satunya adalah merekrut lulusan perguruan tinggi jurusan ilmu perpustakaan.

Seperti diketahui bahwa terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan perpustakaan seperti UI, Unpad, Undip, UGM, UB, UIN, dan sebagainya sedangkan perguruan tinggi swasta seperti UNINUS Bandung, YarsiJakarta, dll. Pendidikan dalam jenjang diploma akan menghasilkan lulusan untuk dapat diangkat dalam jenjang pustakawan terampil, sedangkan untuk jenjang jabatan ahli dapat diambil dari lulusan stratasatu atau dua.³⁹

3. SNP PT No. 13 tahun 2017 terkait tenaga teknis perpustakaan

Tenaga teknis adalah orang yang bekerja dibagian teknis, jika diperpustakaan tenaga teknis itu membantu untuk pengolahan bahan pustaka agar bisa sampai kepada pembacanya. Pada aturan SNP PT juga mencantumkan tenaga teknis yang ada diperpustakaan, penulis melakukan wawancara terkait adakah tenaga teknis di perpustakaan UIN raden fatah, berikut jawaban dari ibu Nirmala:

“Diperpustakaan ini kami memiliki tenaga teknis 2 orang yang bergelar sarjana ilmu perpustakaan di UPT ini, ibu sengaja menempatkan yang lulusan ilmu perpustakaan bagian teknis karena untuk mengolahnya hanya bagian ilmu perpustakaan yang paham jika orang awam takutnya

³⁹ Yuniwati, “Ayo Jadi Pustakawan,” August 30, 2021, Pukul 20:54 WIB, https://www.academia.edu/28758122/AYO_JADI_PUSTAKAWAN.

jadi asal-asal melakukannya. Dan disetiap masing-masing fakultas ada 1 orang tenaga teknis termasuk pada pascasarjana jadi jika digabung seluruhnya jumlahnya 12 orang”⁴⁰

Dapat kita ketahui peraturan untuk tenaga teknis yaitu itu 1 tenaga teknis berbanding 5.000 mahasiswa. Jika dilihat jumlah mahasiswa UIN raden fatah itu berjumlah 25.602 sedangkan tenaga teknis yang tersedia 2 orang, berarti peraturan untuk poin pemenuhan tenaga teknis ini belum dilaksanakan karena seharusnya tersedia 5 orang tenaga teknis yang ada dipepustakaan UIN Raden Fatah.

Pada perpustakaan UIN Raden Fatah ada beberapa peraturan yang telah dijalankan sesuai SNP PT terkait tenaga perpustakaan dan ada juga yang belum menerapkan standar itu. Penulis mencoba menanyakan kepada ibu Nirmala selaku informan, apakah ada kendala dalam menerapkan peraturan SNP PT terkait tentang tenaga perpustakaan dan seperti ini lah tanggapannya dari ibu Nirmala:

“Pasti ada kendala dalam setiap penerapan peraturan, kalau dalam hal ini kami masih banyak kekurangan tenaga perpustakaan yang sesuai dengan SNP PT karena penerimaannya itu melalui tes cpns dan siapa saja yang lulus untuk tes tersebut akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah dan mereka yang diklat juga mereka impasing itu kadang tidak sesuai keilmuannya dengan pekerjaan yang mereka pilih tetapi itu memang ada peraturannya dari pemerintah jadi itu diperbolehkan. Ibu selaku kepala perpustakaan tidak bisa untuk merekrut tenaga perpustakaan dan memenuhi kebutuhan tenaga yang kurang, dan dibagian mana yang belum terpenuhi tenaganya walaupun dari mereka ada juga tenaga BLU itu dipilih oleh pihak UIN untuk dikerjakan diperpustakaan, jadi balik lagi tetap saja ibu tidak bisa untuk melakukan

⁴⁰ Kusumawatie, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:14 WIB.

pemenuhan kebutuhan tenaga tersebut jadinya pihak perpustakaan hanya menerima saja orang yang telah dipilih tadi”⁴¹

Ibu Nurmalina juga menanggapi hal ini dan inilah tanggapannya:

“Kalau dikatakan ada kendala, ya pasti ada kendala apalagi untuk pemenuhan pustakawan karena jika disesuaikan dengan jumlah SNP 500 mahasiswa : 1 pustakawan, maka tenaga pustakawannya kurang”⁴²

Apakah ada upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

Ibu Nirmala memberikan upaya terhadap kendala kurangnya tenaga perpustakaan, seperti inilah jawabannya:

“Kalau upaya ibu telah memberikan karakteristik pegawai yang dibutuhkan kepada pihak UIN terutama pilih mereka yang lulusan ilmu perpustakaan tetapi tetap saja ada beberapa pilihan dari UIN yang bukan sarjana ilmu perpustakaan, sekali lagi ibu tidak bisa menolak orang-orang yang telah diseleksi oleh UIN tadi jadi ibu menggusahkannya misal kalau ada orang yang baru diterima masuk untuk bekerja diperpustakaan ini, ibu akan menempatkan sesuai dengan posisi kemampuan yang dia miliki tetapi jika posisi tersebut telah banyak orang ibu akan menempatkan ditempat yang belum ada atau kurang sehingga dapat memenuhi hal-hal yang kurang tadi terutama pada bagian tenaga kerjanya.”⁴³

Lanjut tanggapan ibu Nurmalina terhadap upaya yang dilakukannya

“Tahun 2020 penambahan 2 orang tenaga pustakawan dan tahun ini ada penambahan lagi 1 orang tenaga nanti ikut tes CPNS, dan sewaktu ibu menjadi kepala juga sudah mengusulkan kepegawaian bahwa kami kekurangan tenaga diperpustakaan dan memang belum pernah ada pengangkatan pegawai CPNS diperpustakaan, baru ada di tahun 2020, itu dari kementerian agama dan terbuka untuk umum.”⁴⁴

⁴¹ Kusumawatie, Pukul 13:14 WIB.

⁴² Wawancara online via whatsapp kepada pustakawan UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:32 WIB.

⁴³ Kusumawatie, Wawancara langsung kepada kepala UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:14 WIB.

⁴⁴ Wawancara online via whatsapp kepada pustakawan UPT Perpustakaan UIN Rden Fatah, Pukul 13:32 WIB.

Pada UPT perpustakaan UIN raden fatah terdapat kendala dalam tenaga perpustakaan yaitu belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan seperti tenaga yang lulusan ilmu perpustakaan yang telah paham dibidanya, tetapi telah ada tambahan tenaga 2 pustakawan melalui bukaan CPNS ditahun 2020 oleh kementrian agama dan tenaga honorer untuk membantu pekerjaan diperpustakaan walaupun mereka bukan lulusan ilmu perpustakaan ibu Nurmala menempatkannya sesuai dengan kemampuan yang mereka ketahui.

Hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPT perpustakaan Universitas Islam Negeri Reden fatah telah memenuhi beberapa poin dari Standar Nasional Perpustakaan No.13 tahun 2017 pada aspek tenaga perpustakaan. Hal yang terpenuhi adalah pada poin kepala perpustakaan karena kepala perpustakaan telah menempuh pendidikan magister ilmu lain dan telah memiliki sertifikasi kompetensi perpustakaan pada bidang pengolahan bahan pustaka. Jika untuk pustakawan serta tenaga administrasinya masih kurang sehingga belum sesuai dengan standar.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui jika dihubungkan dengan SNP PT No.13 tahun 2017 tentang tenaga perpustakaan yang membahas tentang tenaga perpustakaan maka UPT perpustakaan perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan belum sepenuhnya mengimplementasikan. Implementasi disini intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan

oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁴⁵ Jika dikaitkan dengan perpustakaan itu adalah melaksanakan standar perguruan tinggi tetapi belum sepenuhnya terlaksana karena ada beberapa faktor yang menghambat hal tersebut tetapi rata-rata dari ketiga perpustakaan tersebut faktornya adalah sulit untuk penambahan tenaga kerja.

Padahal Peraturan Perpustakaan Nasional RI No.3 Tahun 2019 telah memberikan kebijakan Inpassing bagi PNS di bidang non perpustakaan bisa mengajukan inpassing yang ingin menjadi pejabat fungsional pustakawan karena untuk menambah kurangnya tenaga perpustakaan dan memberikan diklat bagi pustakawan jalur inpassing agar menambah kemampuan mereka dibidang perpustakaan. Hal negatif dari diadakannya Inpassing jabatan fungsional pustakawan Pustakawan banyak dimanfaatkan oleh PNS yang sudah memasuki usia pensiun sebagai “Batu Loncatan”, agar usia pensiun bisa di perpanjang dari usia 58 tahun atau 60 tahun menjadi 65 tahun, Karena dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 pada Bab II Pasal 2 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli media dan ahli pertama, serta pejabat fungsional keterampilan, 60

⁴⁵ Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, hal. 21.

(enam puluh tahun) bagi ditambah dengan ditugaskan pada pelayanan kesehatan negeri, 65 (enam puluh lima) jika ditugaskan secara penuh dibidang penelitian.⁴⁶

Tetapi nyatanya walaupun telah dibuka jabatan fungsional pustakawan masih banyak perpustakaan perguruan tinggi yang kurang tenaga perpustakaan apalagi yang sesuai dengan kebutuhan, walaupun kepala perpustakaan yang ingin menambah tenaga kerja baru diperpustakaan tetap tidak bisa dilakukan, karena biasanya untuk menambah tenaga perpustakaan harus dari lembaga atau universitas itu sendiri atau yang menaungi universitas tersebut, seperti halnya UIN itu dinaungi oleh kementerian agama. Kementerian agama dan kemendikbud harusnya membuka CPNS bagi tenaga pustakawan dan memenuhi kekurangan tenaga pada setiap perguruan tinggi, agar yang ada agar Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat terimplementasikan dengan baik dan pelayanan pada perpustakaan semakin meningkat dengan adanya tambahan pustakawan, karena didalam SNP Perguruan Tinggi tertulis perbandingan antara 500 mahasiswa : 1 pustakawan.

Pada saat ini untuk penambahan tenaga perpustakaan UIN Raden fatah merekrut tenaga honorer yang pembiayaannya itu salah satunya dari (Uang Kuliah Tunggal) UKT mahasiswa dan Untuk Perpustakaan UNSRI serta POLSRI mereka hanya bisa mengajukan keinginan mereka saja kepada pihak universitasnya tanpa tau pasti keinginan untuk penambahan tenaga kerja itu terpenuhi atau tidak, karena yang

⁴⁶ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014,” *Perpustakaan Nasional*, September 7, 2021, Pukul 23:30 WIB, <https://www.perpusnas.go.id/law-detail.php>.

membayai itu pemerintah jadi mereka mengikuti alur dari pemerintah untuk penambahan tenaga pustakawan pada perpustakaan.

Pada bagian pembahasan ini penulis membuat tabel yang berisikan tentang pembahasan secara rinci dan kesesuaian dengan SNP PT No.13 tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nama Pustakawan Universitas Negeri Sriwijaya

No	Pustakawan Universitas Negeri Sriwijaya
1.	Afrizal Aziz, S.IP
2.	Beta Ria Febrianti, S.Sos
3.	Dies Meirita Sari, S.Sos
4.	Elfi Moralita, S.S
5.	Furika, A.Md
6.	Elly Suryani, S.AP
7.	Jaswarman Putra, A.Md
8.	Muhammad. Irwan, S.E
9.	Novita Olivien, S.Sos, M. Hum
10.	Drs. H. Halim Sobri, M.Si
11.	Sri Astuti, S.E
12.	Suherman, A.Ma.Pust
13.	RTS. Tiara Hilda Safitri, S.IP
14.	M. Syafe'I, A.Ma
15.	Drs. Djunaidi, MSLS
16.	Evi Kurnia N,S.Sos
17.	Triady Hermansyah, S.I.Pust
18.	RTS. Tiara Hilda Safitri, S.IP
19.	Novita Vitriana, A.Md
20.	Ermalasari, A.Md
21.	Roki'in, S.Pd
22.	Asmawati, S.AP
23.	Hendry Gunawan, S.AP
24.	Ir.Hj. Siti Rulyah

*Sumber : Dokumentasi Perpustakaan
Universitas Negeri Sriwijaya*

Tabel 4.3
Nama Pustakawan Politeknik Negeri Sriwijaya

No	Politeknik Negeri Sriwijaya
1.	Nilawati, S.E
2.	Trisni. Handayani, S.E
3.	Dyah Ayu Surti, S.Hum
4.	Ahmad Mirat, Sos.i

*Sumber : Dokumentasi Perpustakaan
 Politeknik Negeri Sriwijaya*

Tabel 4.4
Nama Pustakawan Universitas Islam Negeri Raden Fatah

No	Universitas Islam Negeri Raden Fatah
1.	Dra. Nirmala Kusumawatie S.IP.M.Si
2.	Nurmalina, S.Ag., S.S.M.
3.	Armalanda Anto, S.I.Pust
4.	Sopan Sriwijayanto, S.Hum
5.	Sugianto, S.IP
6.	Indrajaya Susilawati, S.Sos.M.Si
7.	Hj. Rika Diana, SH.MM
8.	Nurul Muslima, S.E.M.Si
9.	Maryuzi, S.Ag
10.	Indah Wahyuni, SE.MM.Ak
11.	Diah Gunderi, M.S
12.	Binti Musyrikah
13.	Nuryati, S.Ag.MM
14.	Sri Hartini

*Sumber : Dokumentasi Perpustakaan
 Universitas Islam Negeri Raden Fatah*

Tabel 4.5
Rangkuman Hasil Penelitian

NO	SNP PT NO.13 TAHUN 2017 PADA ASPEK TENAGA PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS NEGERI SRIWIJAYA		POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA		UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH	
A.	Kepala Perpustakaan 1. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.	Kepala perpustakaan bertanggung jawab kepada rektor	✓	Kepala perpustakaan bertanggung jawab kepada direktur terhadap semua kegiatan yang ada di perpustakaan	✓	Bertanggung jawab wakil rektor 1 yang dengan masalah perpustakaan, dan wakil rektor 2 yang berkaitan dengan pembiayaan/dan a	✓
	2. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister	Pendidikan S2 lulusan Teknik Mesin	✓	Pendidikan S2 lulusan Teknik	✓	Pendidikan S1 ilmu perpustakaan S2 dibidang lain	✓

	lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.						
	3. Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.	Tidak ada	—	Tidak ada	—	Memiliki sertifikasi kompetensi dibidang pengelolaan bahan pustaka	✓
B.	Pustakawan Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan.	Pustakawan 13 Mahasiswa 38.143	—	Pustakawan 4 Mahasiswa 8.305	—	Pustakwan 14 Mahasiswa 25.602	—
C.	Tenaga teknis perpustakaan	Tenaga teknis 13	—	Tenaga teknis 15	—	Tenaga teknis 12	—

	Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.	Mahasiswa 38.143		Mahasiswa 8.305		Mahasiswa 25.602	
	Jumlah	2		2		3	

